KPK Didesak Periksa Bobby .....

Dari Halaman 1

adalah Gubernur, dan Kadis itu sebelumnya menjabat di Kota Medan saat Bobby masih menjadi wali kota, maka KPK tidak boleh ragu. Jika ada indikasi, segera tetapkan. Jangan tunggu tekanan publik terlalu besar untuk bertindak," ungkap Azmi.

Di Gedung KPK RI, perwakilan massa GERBRAK diterima oleh Suhendar dari Biro Humas. Ia berjanji akan meneruskan tuntutan ini ke pimpinan KPK dan menyampaikan perkembangan kasus ke publik jika ada update signifikan.

Di Mabes Polri, perwakilan diterima oleh Iptu Baginda dari Divisi Humas Mabes Polri. Dalam dialognya, Iptu Baginda menyampaikan bahwa laporan GERBRAK akan segera diteruskan ke Bareskrim dan pimpinan Polri untuk mendapat perhatian lebih lanjut, terutama terkait temuan BPK RI.

Sedangkan di Kejaksaan Agung RI, dialog dilakukan dengan Amrul Ihlasul dari PAM Dalam Kejagung. Ia menyatakan kesiapannya untuk menyampaikan tuntutan GERBRAK ke pimpinan Kejaksaan Agung RI.

Setelah menyelesaikan aksinya di tiga titik, massa GERBRAK membubarkan diri secara tertib. Namun, gema suara mereka tak akan berhenti di jalanan. Sebab suara itu kini telah menjadi gelombang yang mengguncang nurani bangsa.**(A-10)**

Rekening Rakyat Diblokir: Salah Kaprah, ...

Dari Halaman 1

absurd ini, sayangnya, justru diterapkan secara sistematis.

Negara kini tampak lebih rajin menindak apa yang diam, daripada memburu yang jelas-jelas berbahaya. Tanah yang tidak digarap dua tahun disita negara. Rekening yang tak aktif tiga bulan dibekukan. Tapi manusia yang menganggur bertahun-tahun? Tidak dibantu, tak dicari, bahkan seringkali dicap beban. Ini adalah potret sesat pikir dalam kebijakan publik—ketika segala sesuatu diukur dari "perputaran", bukan keadilan.

Dalam prinsip hukum yang sehat, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya (presumption of innocence). Tapi praktik pemblokiran rekening hari ini membalik prinsip itu: rakyat kecil harus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Bahwa uang mereka sah. Bahwa diam mereka bukan dosa. Negara, dalam hal ini, tidak lagi berfungsi sebagai pelindung, tapi berubah menjadi entitas yang mengawasi dan mengadili tanpa proses.

Lebih ironis lagi, ketika rakyat biasa diblokir, para penjahat besar justru berkeliaran. Bandar judi online terus beroperasi dengan jaringan ribuan rekening penampung. Koruptor kelas kakap masih bisa menyamarkan uang haram mereka lewat skema canggih pencucian uang. Tapi yang dibekukan justru rekening gaji, tabungan darurat, dan dana hasil kerja keras.

PPATK—lembaga yang seharusnya memantau transaksi keuangan gelap—kini tampak lebih sibuk memeriksa warga biasa. Narasi "pencegahan pencucian uang" dijadikan selimut kebijakan untuk menindas yang tidak bisa melawan. Tidak ada kejelasan kriteria, tidak ada notifikasi, tidak ada mekanisme keberatan yang jelas. Ini bukan lagi soal administratif, ini soal pelanggaran hak warga negara.

Negara yang terlalu cepat mencurigai, tapi terlalu lambat mengklarifikasi, pada akhirnya hanya akan memupuk ketakutan. Dan ketakutan adalah lawan dari kepercayaan. Jika sistem perbankan dipakai untuk membekukan yang tak bersalah, maka rakyat akan mulai menarik diri. Menyimpan uang di rumah, membeli emas, atau kembali ke transaksi informal. Ketika itu terjadi, bukan hanya bank yang kehilangan nasabah, tapi negara kehilangan legitimasi.

Yang dibutuhkan saat ini bukan kegigihan memburu uang yang tenang, tapi keberanian untuk mengejar dana kotor yang bersembunyi dalam sistem. Bukan membekukan rekening rakyat, tapi merampas aset para koruptor. Bukan mencurigai tabungan kecil, tapi membongkar rekening gendut para penjahat keuangan.

Negara mesti tahu: tidak semua yang diam itu busuk. Ada banyak warga yang menyimpan uangnya dalam diam karena percaya pada sistem. Ketika kepercayaan itu dibalas dengan blokir sepihak, maka yang rusak bukan hanya rekening, tapi juga harga diri rakyat.

Sudah saatnya negara berhenti curiga pada yang lemah, dan mulai serius memburu yang berbahaya!(*)

Imigrasi RI Cabut Paspor Riza Chalid .....

Dari Halaman 1

Kejagung juga menetapkan Riza Chalid selaku beneficial owner dari PT Orbit Terminal Merak (OTM) dan anaknya Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa.

Kejagung menyebut total kerugian negara dalam perkara korupsi tersebut mencapai Rp285 triliun yang terdiri dari kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 dan Rp91,3 triliun dari kerugian perekonomian negara.

Riza diketahui sudah dua kali mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka. Rencananya, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) akan menjadwalkan pemanggilan ketiga terhadap Riza.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Yuldi Yusman mengatakan pengusaha minyak itu tercatat berada di Malaysia. Hal tersebut berdasarkan data perlintasan orang dalam kesisteman aplikasi V4.0.4 Imigrasi RI.

Riza Chalid tercatat meninggalkan Indonesia menuju Malaysia pada 6 Februari 2025 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan belum masuk kembali ke wilayah Indonesia.**(cnni/js)**

PPATK Blokir 31 Juta Rekening Nganggur .....

Dari Halaman 1

kami bekukan. Jumlah rekening terbanyak yang dormant adalah dalam periode 5 tahun atau lebih, ada sebanyak lebih dari 31 juta rekening dengan nilai lebih dari Rp6 triliun," katanya pada CNNIndonesia.com, Selasa (29/7).

Natsir mengatakan 31 juta rekening dormant tersebut dibekukan oleh PPATK sepanjang tahun ini. Namun, ia belum memiliki data pasti rekening dormant di bawah lima tahun yang sudah diblokir.

Namun, ia menegaskan tidak ada kriteria 3 bulan rekening nganggur akan diblokir PPATK.

"Waktu 3 bulan itu adalah jangka waktu jika nasabah masuk kriteria sangat berisiko, misalnya buka rekening untuk judi online dan habis itu ditinggal setelah dilakukan pengkinian data oleh bank," katanya.

Natsir mengatakan pembekuan dilakukan untuk mencegah potensi rekening nganggur disalahgunakan jika tidak ada yang menjaganya atau bahkan jika nasabah lupa memiliki rekening rekening tersebut.

"Jadi tidak ada kekhawatiran rekening hilang dan lain-lain, justru pemerintah sedang menjaga dan hadir untuk melindungi masyarakat," katanya.

PPATK sebelumnya mengungkapkan rekening dormant memang rawan disalahgunakan, seperti untuk menampung dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nominee sebagai rekening penampungan, transaksi narkotika, hingga korupsi.

Meski diblokir, uang nasabah diklaim tetap aman dan 100 persen utuh. Nasabah bisa mengajukan keberatan kepada PPATK dengan mengisi formulir di bit.ly/FormHensem.**(cnni/js)**

Eks Stafsus Nadiem Bungkam Usai Diperiksa .....

Dari Halaman 1

klarifikasi tersebut. Sejumlah pertanyaan yang dilontarkan wartawan tak digubris.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo belum bisa berbicara banyak mengenai proses tersebut. Sebab, dia menjelaskan penyelidikan merupakan proses yang tertutup atau rahasia.

"Karena masih tahap penyelidikan tentu belum bisa kami sampaikan secara rinci," kata Budi.

Waktu atau tempus dugaan korupsi yang tengah diselidiki KPK ini terjadi pada saat pandemi Covid-19.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penyelidikan Google Cloud di Kemendibudristek berbeda dengan kasus dugaan korupsi laptop pendidikan Chromebook yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.

"Terkait dengan Google Cloud, apakah sama dengan Chromebook yang sekarang sedang ditangani [Kejagung], berbeda jawabannya," ujar Asep, Jakarta, Jumat (25/7) seperti dikutip dari Antara.

Asep menjelaskan kasus Chromebook terkait dengan pengadaan perangkat keras, sedangkan Google Cloud merupakan pengadaan perangkat lunak.

Walaupun demikian, Asep mengatakan KPK tetap akan berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung terkait penyelidikan Google Cloud.

"Kami tentunya juga sudah berkomunikasi dengan pihak Kejaksaan Agung untuk penanganan perkaranya karena nanti ini menjadi hal yang berbeda, walaupun ini paket yang tidak bisa dipisah antara hardware [perangkat keras] dengan software [perangkat lunak]," kata jenderal polisi bintang satu ini.**(cnni/js)**

Rusia 'Digoncang' Erupsi Gunung Api .....

Dari Halaman 1

uchevskoy Sopka terakhir kali meletus pada 28 Oktober 2023 lalu.

Peristiwa itu membuat pemerintah kota di sekitar gunung tersebut mengevakuasi warga, dan menutup sekolah serta tempat umum lantaran erupsi memicu abu vulkanik yang sangat tebal.

Hingga kini belum ada detail perkembangan situasi terkini di sekitar Gunung Klyuchevskoy Sopka.

Gempa dengan magnitudo 8,8 mengguncang wilayah Kamchatka, Rusia. Pusat gempa dilaporkan sekitar 136 kilometer timur Petropavlovsk di semenanjung Kamchatka dengan kedalaman 19 kilometer.

Guncangan itu menjadi gempa terbesar di dunia sejak 2011, dan terkuat di Kamchatka sejak 1952.

Badan Geologi AS atau USGS sampai merevisi kekuatan gempa dua kali yang pertama kali tercatat magnitudo 8,0, lalu direvisi menjadi 8,7 dan kini 8,8.

Gempa tersebut memicu tsunami di beberapa wilayah Rusia dan peringatan tsunami di sejumlah negara Pasifik termasuk Hawaii di Amerika Serikat, Jepang, Indonesia, hingga Korea Selatan.**(cnni/js)**

Hijau di Permukaan, Mati di Dalam Tanah .....

Dari Halaman 1

Kekhawatiran ini disampaikan oleh Prof. Johannes Tarigan, Guru Besar Teknik Sipil USU. Mengutip pemberitaan DetikSumut (12 Juli 2022), ia memperingatkan bahwa pohon trembesi tua di sekitar lapangan terancam akibat penggalian basement sedalam 6-8 meter:

Aktivis lingkungan juga sudah mengingatkan proyek ini melanggar ruang terbuka hijau (RTH), mengurangi hingga 175 x 275 m² RTH yang awalnya berfungsi sebagai resapan air. Rahmadsyah, pemerhati ruang kota, dalam keterangannya kepada KabarRiau (15 Februari 2024) menegaskan, "RTH Medan cuma 7 persen, kalau dibiarkan Lapangan Merdeka dilubangi, itu sama dengan mengurangi RTH kota." Dia menyebut proyek itu tak ramah lingkungan dan diduga melanggar UU RTH."

Sementara itu, WALHI Sumut menilai bahwa revitalisasi tersebut telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan ruang hidup kota. Dalam siaran pers WALHI yang dikutip Tribun Medan (20 Oktober 2023), Direktur Eksekutif WALHI Sumut Riko Kurniawan mengatakan revitalisasi tidak bisa dijalankan dengan pendekatan estetika semata. Harus ada uji dampak ekologis mendalam. Jika tidak, ini hanya akan menciptakan krisis air dan panas ekstrem di jantung kota.

Lebih ironis, tidak ada dokumen AMDAL yang bisa diakses publik, apalagi kajian secara terbuka dari Dinas Lingkungan Hidup. Tidak ada ahli hidrologi kota yang dilibatkan. Hanya alat berat dan narasi pembangunan yang bersuara, sementara pohon tua dan serapan air kota ini berpaling dalam diam.

Koalisi Masyarakat Sipil Sumut (KMS-SU) juga melaporkan bahwa struktur landfill basement dan bor pile ribuan titik secara langsung menggusur tanah serapan dan vegetasi lama tanpa kompensasi ekologis yang memadai. Di sisi lain, praktik greenwashing, seolah hijau, tapi faktanya mengurasi ruang hidup bumi.

Saat itu banjir masih mewarnai Jalan Pemuda, Jalan Pandu, dan Jalan Ahmad Yani, beberapa ratus meter dari lokasi proyek. Air mancur tampak menawan di foto publikasi, tapi kerusakan ekologis di bawahnya asyik disembunyikan.

Wawasan lingkungan perkotaan hari ini menuntut pendekatan lain rewilding urban spaces yakni mengembalikan area perkotaan ke keadaan alaminya, dengan tujuan meningkatkan keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem. Merawat kota dengan alamnya, bukan menggantinya. Sementara itu, revitalisasi Lapangan Merdeka menumpahkan beton tanpa komitmen terhadap sumur resapan, bio-filtrasi, atau penanaman pohon pelindung.

Jika kota ini masih mau bernapas, perlu ada evaluasi radikal terhadap proyek yang menghancurkan fungsi ekologis tanpa dialog substansial. Jika kita punya nurani ekologis, kita tidak boleh hanya mengagumi taman cantik dari atas, sambil membiarkan tanah di bawahnya mati perlahan.

Pembangunan yang tak sadar ekologis adalah bencana yang tertunda. Lapangan Merdeka bisa terlihat hijau dari pandangan, tetapi dia tidak menghidupi ekosistemnya. Dan jika ini diteruskan, warisan yang kita tinggalkan bukanlah taman sejarah, melainkan kota bertanah mati.(*)

Pastikan Siap untuk .....

Dari Halaman 1

Timnas U-17 diagendakan akan menggunakan Stadion Utama Sumut untuk training centre (TC) di bulan Agustus, melakukan beberapa pertandingan persahabatan dengan negara lain. Kemudian di September, Stadion Utama Sumut akan menjadi kandang PSMS Medan selama musim 2025-2026.

"Kita ingin memastikan lapangan, stadion dan fasilitas-fasilitasnya karena mulai digunakan pertama untuk event PSSI dan kedua sebagai kandang PSMS, secara visual sudah baik dan sesuai standar FIFA," kata Bobby Nasution, usai meninjau Stadion Utama Sumut, Batangkuis, Deliserdang, Minggu (27/7).

Bobby Nasution mengecek hampir seluruh sisi stadion dari lorong, ruang ganti, ruang technical meeting dan kamar mandi. Di bagian luar, Bobby Nasution mengecek bangku, ruang VIP dan juga kualitas rumput.

Dia meminta kepada seluruh masyarakat, terutama suporter untuk bersama-sama menjaga stadion kebanggaan Sumut ini. Kedewasaan supporter, menurutnya, salah satu indikator pelaksanaan event di Sumut nantinya.

"Event PSSI bulan depan itu akan menjadi event pertama internasional sepakbola di stadion kebanggaan kita bila tidak ada halangan, kemudian digunakan dalam waktu yang panjang untuk Liga 2, jadi kami berharap kita jaga bersama," kata Bobby Nasution.

Exco PSSI Arya Sinulingga mengatakan, Stadion Utama Sumut telah melakukan berbagai perbaikan dalam beberapa bulan terakhir. "Beberapa bulan terakhir kita terus melakukan perbaikan dan banyak dibantu Pak Gubernur, stadion ini banyak yang memuja-mujanya karena memang bagus," kata Arya Sinulingga.

Sementara itu, Dirut PT Kinantan Medan Indonesia (KMI) Arifuddin Maulana sangat berterima kasih atas dukungan Bobby Nasution ke PSMS. Dia berharap, PSMS bisa memberikan yang terbaik musim ini untuk Sumut.

"Ini dukungan yang sangat luar biasa, kami sangat beterima kasih, jadi amanah ini harus kita jaga, berupaya maksimal memberikan yang terbaik untuk Sumut," kata Ariffuddin.

Ikut meninjau Stadion Utama Sumut, Kadispora Pemprov Sumut Mahfullah Pratama Daulay dan OPD terkait lainnya. Hadir juga jajaran pengurus PSMS, calon pelatih PSMS Kas Hartadi dan beberapa suporter PSMS. **(A-05)**

Korupsi Hancurkan Bangsa

Dari Halaman 1

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Al-Qur'an dengan tegas mengutuk tindakan korupsi dalam berbagai bentuknya. Salah satunya adalah ghulul—yakni penggelapan harta yang menjadi tanggung jawab publik. Dalam QS. Ali Imran ayat 161, Allah SWT berfirman: "Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya." Ayat ini menegaskan bahwa setiap penyalahgunaan wewenang akan mendapatkan balasan setimpal, tak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

Korupsi juga kerap hadir dalam bentuk suap, yang dalam Islam dikenal sebagai risywah. Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara di antara keduanya." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, korupsi adalah bentuk kezaliman yang tidak bisa ditoleransi.

Dampak korupsi begitu nyata. Ia menciptakan jurang ketimpangan antara kaya dan miskin, menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap negara, merusak pelayanan publik, dan menghambat pembangunan. Lebih dari itu, korupsi menghilangkan keberkahan dalam kehidupan. Harta yang diperoleh secara haram hanya akan membawa kesengsaraan dan kehancuran, baik secara pribadi maupun kolektif.

Lalu bagaimana solusi Islam dalam menghadapi korupsi?

Pertama, pendidikan moral berbasis tauhid harus menjadi fondasi utama. Kesadaran bahwa Allah Maha Melihat menjadi benteng utama dalam menjaga integritas. Pemimpin dan pejabat publik harus memiliki rasa takut kepada Allah yang lebih besar daripada takut kepada aparat penegak hukum.

Kedua, Islam menganjurkan sistem hisbah atau pengawasan publik yang kuat. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, tidak segan memanggil dan memeriksa harta pejabatnya. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan.

Ketiga, hukuman terhadap pelaku korupsi harus tegas dan adil. Dalam maqashid syariah (tujuan syariat), penegakan hukum bertujuan menjaga harta, agama, dan tatanan sosial. Jika korupsi dibiarkan, maka kehancuran akan merajalela.

Keempat, masyarakat juga memiliki tanggung jawab kolektif. Diam terhadap korupsi adalah bentuk pembiaran terhadap kezaliman. Nabi mengingatkan, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan, jika tidak mampu maka dengan lisan, dan jika tidak mampu maka dengan hati. Itulah selemah-lemahnya iman." (HR. Muslim).

Sudah saatnya kita membangun budaya anti-korupsi berbasis nilai-nilai keislaman. Negara yang kuat dibangun di atas fondasi moral yang kokoh, bukan hanya peraturan yang rumit. Jika korupsi adalah musuh bersama, maka Islam telah memberikan senjata spiritual yang ampuh: kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan takut kepada Allah.

Korupsi bukan hanya penggerogot keuangan negara, tetapi pengkhianatan terhadap masa depan anak cucu kita. Maka, memberantasnya adalah bentuk ibadah, jihad moral yang mulia, dan wujud nyata cinta tanah air.